Hukum Acara Pidana.

Karena pemeriksaan persidangan di Pengadilan Negeri telah lanjut, kemudian terbentur pada "praejudicieel geschil" tentang hak milik atas tanah termaksud, maka tidak dapat digunakan lembaga "afwijzende beschikking" menurut pasal 250 (3) R.I.B., yang seharusnya diberikan sebelum perkara diperiksa.

Acara yang seharusnya ditempuh ialah : – sidang ditunda sampai Hakim Perdata menentukan siapa yang berhak atas tanah itu dengan memberikan waktu tertentu kepada terdakwa untuk mengajukan gugat perdata,

atau langsung diputus oleh Hakim Pidana berdasarkan bukti-bukti yang didapatkan dalam pemeriksaan pidana.

Putusan Mahkamah Agung, tgl. 9 April 1980 No. 129 K/Kr./1979.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut :

Mahkamah Agung tersebut :

Membaca putusan Pengadilan Negeri di Garut tanggal 7 Pebruari 1978 No. 214/1977 Pid S.PN Grt dalam putusan mana perkara para tertuduh :

- I. *Ayub bin Awinta*, umur 24 tahun, lahir dan bertempat tinggal di kampung Serut, desa Pasirwaru, kecamatan Limbangan, kabupaten Garut, pekerjaan tani ;
- II. *Ihin bin Awinta*, umur 20 tahun, lahir dan bertempat tinggal di kampung Serut, desa Pasirwaru, kecamatan Limbangan, kabupaten Garut, pekerjaan tani ;
- III. *Uwat bin Awinta*, umur 19 tahun, lahir dan bertempat tinggal di kampung Serut, desa Pasirwaru, kecamatan Limbangan, kabupaten Garut, pekerjaan tani ;
- IV. *Dede bin Awinta*, umur 18 tahun, lahir dan bertempat

tinggal di kampung Serut, desa Pasirwaru, kecamatan
Limbangan, kabupaten Garut, pekerjaan tani ;
tertuduh-tertuduh berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena
dituduh :

Tuduhan I :

bahwa mereka para tertuduh secara bersama-sama maupun ber-
tindak sendiri-sendiri pada waktu yang tidak pasti setidak-tidaknya
pada bulan Maret 1977 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam
tahun 1977 di sawah blok Ciambar termasuk desa Pasirwaru kecamatan
Bl. Limbangan setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih ter-
masuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Garut dengan sengaja dan
melawan hak telah memiliki padi sebanyak 210 kg, setidak-tidaknya
lebih dari harga Rp. 250,-. Barang mana yang sebagian maupun se-
luruhnya adalah milik mereka para tertuduh.

Perbuatan mana diatur dan diancam berdasarkan pasal 55 jo pasal 362
KUHP.

Tuduhan II :

bahwa mereka para tertuduh secara bersama-sama maupun ber-
tindak sendiri-sendiri pada waktu yang tidak dapat ditentukan dengan
pasti tapi setidak-tidaknya sejak bulan Oktober 1976 sampai dengan
sekarang di tanah sawah blok Ciambar seluas 100 da, sawah darat
di blok Serut seluas 55 da dan di blok Muntur luas 3 ha atau setidak-
tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum
Pengadilan Negeri Garut telah dengan sengaja memakai tanah tanpa
ijin yang berhak atau kuasanya yang syah atau menguasai atau meng-
garap tanah sawah/darat seluas tersebut di atas, sehingga dari per-
buatan mereka para tertuduh tersebut di atas telah merugikan kuasa-
nya yang syah yaitu Amad bin Amsar atau Ami Sahroni bin Ahmad.
Perbuatan mana diatur dan diancam berdasarkan pasal 2 yo pasal 6
(1) sub a dan 6 (1) sub a dan b Undang-undang No. 51/1960.

dengan memperhatikan undang-undang yang bersangkutan telah
dinyatakan adalah soal persengketaan hak milik seperti tercantum
dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut yang amar lengkapnya
berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan, oleh karena perkara terdakwa-terdakwa dalam per-
kara ini ialah soal persengketaan hak milik, maka Pengadilan Negeri

yang memeriksa perkara pidana tidak berwenang untuk memeriksa perkara ini.

Menetapkan, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) photo copy Surat Penyerahan tertanggal 10 Oktober 1976 tetap terlampir dalam berkas perkara ini kecuali apabila bukti tersebut akan digunakan oleh yang berhak untuk perkara lain.

Menetapkan, bahwa ongkos perkara seluruhnya ditanggung oleh Negara.

putusan mana dalam pemeriksaan pada tingkat banding telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi di Bandung dengan putusannya tanggal 13 Oktober 1978 No. 140/1978 Pid. PTB yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Menerima permohonan banding tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Garut tertanggal 7 Pebruari 1978, No. 214/1977 Pid. S.P.N. Garut, yang dimohon banding ;

Mengadili sendiri

Menyatakan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tak dapat diterima ;
Barang bukti berupa 1 (satu) photo copy Surat Penyerahan tertanggal 10 Oktober 1976 tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Membebaskan biaya perkara dalam peradilan ini kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang penuntutan kasasi No. 214/1977 Pid. S.P.N. Garut yang dibuat oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri di Garut yang menerangkan, bahwa pada tanggal 1 Pebruari 1979 Jaksa pada Kejaksaan Negeri di Garut telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan risalah kasasi tertanggal 12 Pebruari 1979 dari Jaksa sebagai penuntut kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri di Garut pada tanggal 14 Pebruari 1979 ;

Melihat kesimpulan tertulis dari Jaksa Agung tanggal 9 Oktober 1979 No. 18/1979 dalam kesimpulan mana Jaksa Agung pada pokoknya berpendapat bahwa kiranya Mahkamah Agung akan menerima permohonan kasasi tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Melihat surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dengan berlakunya Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah mencabut Undang-undang No. 19 tahun 1964

tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (yang lama) dan hukum acara kasasi seperti yang dimaksudkan dalam pasal 49 (4) Undang-undang No. 13 tahun 1965 sampai kini belum ada, maka Mahkamah Agung menganggap perlu untuk menegaskan lagi hukum acara kasasi yang harus dipergunakan ;

bahwa mengenai hal ini berdasarkan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970, maka pasal 70 Undang-undang No. 13 tahun 1965 harus ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu, bukan Undang-undang No. 1 tahun 1950 secara keseluruhan, melainkan sekedar mengenai hal-hal yang telah diatur dalam Undang-undang No. 13 tahun 1965 kecuali kalau bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970 ;

bahwa dengan demikian maka yang berlaku sebagai hukum acara kasasi adalah hukum acara kasasi yang diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1950, sekedar tidak bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970 ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada penuntut kasasi pada tanggal 16 Januari 1979 dan penuntut kasasi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Pebruari 1979 serta risalah kasasi pada tanggal 14 Pebruari 1979 di kepaniteraan Pengadilan Negeri di Garut, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh penuntut kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

bahwa putusan Pengadilan Tinggi adalah sangat bertentangan dengan hukum yang berlaku, yakni setidaknya-tidaknya ada kesalahan dalam pelaksanaannya dan sama sekali tidak melaksanakan cara melakukan peradilan yang mesti diturut menurut undang-undang ;

bahwa penuntut kasasi sangat keberatan terhadap putusan Pengadilan Tinggi dimana dinyatakan bahwa tuntutan Jaksa, tidak dapat diterima sedangkan berdasarkan ketentuan undang-undang ada 3 (tiga) macam putusan yang tercantum dalam pasal-pasal 313, 314 dan 315 H.I.R. ;

Menimbang, bahwa atas ketentuan-ketentuan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa keberatan-keberatan tersebut dapat diterima karena pemeriksaan di persidangan Pengadilan Negeri telah berlanjut dan ter-

bentur pada "praejudicieel geschil" tentang hak milik atas tanah tersebut, maka tidak dapat digunakan lembaga "afwijzende beschikking", menurut pasal 250 (3) R.I.B. yang seharusnya diberikan sebelum perkara diperiksa, lagi pula yang seharusnya ditempuh ialah menunda sidang sampai Hakim perdata menentukan siapa yang berhak atas tanah tersebut dengan memberikan waktu tertentu kepada terdakwa untuk mengajukan gugat perdata atau langsung diputus oleh Hakim pidana berdasarkan bukti-bukti dalam pemeriksaan pidana :

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi di Bandung harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri seperti ternyata di bawah ini ;

Memperhatikan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970, Undang-undang No. 13 tahun 1965 dan Undang-undang No. 1 tahun 1950 ;

MEMUTUSKAN

Menerima permohonan kasasi dari penuntut kasasi Jaksa pada Kejaksaan Negeri di Garut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi di Bandung tanggal 13 Oktober 1878 No. 140/1978 Pid. PTB.

dan mengadili sendiri

Mengembalikan perkara para tertuduh :

I. Ayub bin Awinta, II. Ihin bin Awinta, III. Uwat bin Awinta, IV. Dede bin Awinta, kepada Pengadilan Tinggi di Bandung untuk dibuka kembali pemeriksaannya dan diputus dalam tingkat banding ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat ini kepada Negara.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Rabu tanggal 9 April 1980 oleh Busthanul Arifin SH sebagai Ketua, Purwosunu SH dan R. Poerwoto S. Gandasoebrata SH Hakim-hakim-Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Rabu tanggal 16 April 1980 oleh Busthanul Arifin SH sebagai Ketua, dengan dihadiri oleh Sri Widjojati Wiratmo Soekito SH dan R. Poerwoto Soehadi Gandasoebrata SH, Jaksa Agung Muda dan dihadiri oleh Ny. M.P. Lesilolo, Panitera-Pengganti Luar Biasa, serta tidak dihadiri oleh para penuntut kasasi.

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI DI BANDUNG yang mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa-terdakwa :

1. *Ayub bin Awinta*, umur 24 tahun, dilahirkan dan bertempat tinggal di kampung Serut, desa Pasirwaru, kecamatan Limbangan, kabupaten Garut, pekerjaan tani ;
2. *Ihin bin Awinta*, berumur 20 tahun, dilahirkan dan bertempat tinggal di kampung Serut, desa Pasirwaru, kecamatan Limbangan, kabupaten Garut, pekerjaan tani ;
3. *Uwat bin Awinta*, berumur 19 tahun, dilahirkan dan bertempat tinggal di kampung Serut, desa Pasirwaru, kecamatan Limbangan, kabupaten Garut, pekerjaan tani ;
4. *Dede bin Awinta*, berumur 18 tahun, dilahirkan dan bertempat tinggal di kampung Serut, desa Pasirwaru, kecamatan Limbangan, kabupaten Garut, pekerjaan tani ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca surat-surat pemeriksaan Pengadilan Negeri di Garut serta putusannya tanggal 7 Pebruari 1978/Pid/S. No. 214/1977 Pid. P.N. Garut, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan, oleh karena perkara terdakwa-terdakwa dalam perkara ini ialah soal persengketaan hak milik, maka Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara pidana tidak berwenang untuk memeriksa perkara ini.

Menetapkan, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) photo copy Surat Penyerahan tertanggal 10 Oktober 1976 tetap terlampir dalam berkas perkara ini kecuali apabila bukti tersebut akan digunakan oleh yang berhak untuk perkara lain.

Menetapkan, bahwa ongkos perkara seluruhnya ditanggung oleh Negara.

Menimbang, bahwa terhadap putusan Hakim Pertama Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 Pebruari 1978, telah memohon pemeriksaan dalam tingkat banding, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada para terdakwa pada tanggal 14 Pebruari 1978 dengan seksama ;

Menimbang, bahwa permohonan akan pemeriksaan banding tersebut, diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam tenggang waktu dan dengan cara serta telah memenuhi syarat-syarat menurut undang-undang, oleh karena mana permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Memperhatikan memori banding yang telah diajukan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa ternyata selama pemeriksaan perkara di muka persidangan Hakim Pertama, bahwa sehubungan dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan ternyata haruslah dibuktikan lebih dahulu siapa yang sebenarnya berhak atas sawah/tanah darat tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pengadilan Tinggi berpendapat tuntutan Jaksa Penuntut Umum masih belum waktunya diajukan, karena perihal siapa pemilik tanah yang hasilnya diambil oleh para terdakwa masih dalam sengketa dan belum ada putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, oleh karena itu tuntutan Jaksa tersebut, haruslah dinyatakan tak dapat diterima; dengan demikian, maka barang-barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa berhubung dengan pendapat Pengadilan Tinggi tersebut di atas, oleh karena putusan Hakim Pertama tersebut bertentangan dengan putusan ini, haruslah dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri yang amarnya akan disebutkan di bawah nanti ;

Menimbang, bahwa biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan akan pasal-pasal dari undang-undang dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menerima permohonan banding tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Garut tertanggal 7 Pebruari 1978, No. 214/1977 Pid. S.P.N. Grt., yang dimohon banding ;

Mengadili sendiri

Menyatakan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tak dapat diterima ;
Barang bukti berupa 1 (satu) photo copy Surat Penyerahan ter-
tanggal 10 Oktober 1976 tetap terlampir dalam berkas perkara ;
Membebaskan biaya perkara dalam peradilan ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 1978,
oleh kami **Adi Andojo Soetjipto SH**, Ketua Pengadilan Tinggi Bandung,
sebagai Hakim Ketua, dengan **Rochyat Suryadharma SH** dan **Ny. Mursi-**
yah Bustaman SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan
surat penetapan penunjukan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan
Tinggi tersebut tertanggal 22 September 1978 No. 140/1978/P.T.B.
putusan mana diucapkan di muka umum dalam persidangan terbuka
yang diadakan pada hari itu juga dengan dihadiri oleh **Deni Djanakum**,
Panitera Pengganti, tetapi tanpa hadlirnya **Jaksa Penuntut Umum** dan
para terhukum.

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI GARUT.

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara-perkara ini ;

Telah mendengar keterangan terdakwa-terdakwa dan saksi-saksi ;

Telah mendengar pula uraian tuntutan Jaksa yang pada pokoknya Jaksa berpendapat bahwa terdakwa-terdakwa terang bersalah melakukan kejahatan sebagaimana dituduhkan kepada terdakwa-terdakwa dalam Tuduhan ke I dan ke II, untuk mana Jaksa menuntut agar terdakwa-terdakwa dihukum penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan segera masuk, sedangkan barang bukti berupa sawah dan tanah yang dibicarakan dalam 1 (satu) photo copy Surat Penyerahan tertanggal 10 Oktober 1976 dikembalikan kepada yang berhak yaitu Ahmad bin Amsar serta terdakwa-terdakwa dituntut pula membayar ongkos perkara ;

Memperhatikan pembelaan pembela terdakwa-terdakwa yang akhirnya berkesimpulan agar terdakwa-terdakwa dibebaskan dari segala tuduhan ;

Menimbang, bahwa terdakwa-terdakwa telah mungkir melakukan apa yang dituduhkan terhadap terdakwa-terdakwa baik yang tercantum dalam tuduhan ke I maupun dalam tuduhan ke II ;

Menimbang, bahwa terdakwa-terdakwa dalam persidangan telah menerangkan antara lain sebagai berikut :

1. bahwa terdakwa-terdakwa menerangkan bahwa sawah yang terletak di blok Ciambar, tanah darat (pekarangan) di Kp. Serut dan tanah darat di blok Muntur adalah kepunyaan bapak terdakwa bernama Awinta dan Awinta memperoleh barang tersebut dari kakeknya terdakwa-terdakwa yang bernama Ahmid.

2. bahwa terdakwa-terdakwa menerangkan bahwa sawah dan tanah darat tersebut sewaktu bapaknya Awinta masih ada telah digarap oleh bapaknya, dan setelah meninggal dunia sawah blok Ciambar digarap

oleh ibu terdakwa-terdakwa sedangkan tanah darat di kampung Serut dan blok Muntur oleh terdakwa-terdakwa secara bersama-sama sampai sekarang.

3. bahwa terdakwa-terdakwa telah mengakui bahwa benar pada tanggal 10 Oktober 1976 bertempat di Balai Desa Pasir Waru telah diadakan musyawarah mengenai barang sawah dan tanah darat tersebut di atas antara bapak terdakwa-terdakwa (Awinta) dan Ahmad bin Amsar dengan dihadiri oleh Awinta, terdakwa ke 1 dan ke 2, Ami Sahroni, Kepala Desa Pasir Waru, Encup Syamsudin, Ahmad Sadili, Dili, R. Ahmad dan A.H. Abdulmanan.

4. bahwa terdakwa menerangkan musyawarah tersebut antara bapak terdakwa (Awinta) dan pihak Ahmad yang diwakili oleh Ami Sahroni itu tidak ada penyelesaian tegasnya. Awinta tidak menyerahkan sawah dan tanah darat tersebut kepada pihak Ahmad (Ami Sahroni).

5. bahwa terdakwa-terdakwa telah mengakui memang benar telah mengambil hasil padi dari sawah blok Ciambar sebagai paroannya dari penggarap Oyo atas suruhan bapak terdakwa-terdakwa (Awinta) dan padinya itu diserahkan kepada Awinta.

6. bahwa terdakwa ke 1 dan ke 3 telah menanda tangani Surat Penyerahan tersebut tanggal 10 Oktober 1976 di rumah bapaknya, Awinta yang disodorkan oleh Tua Kampung Dili tanpa dibaca dahulu apa isinya zegel itu.

7. bahwa terdakwa ke 2 Ihin menerangkan benar telah membaca zegel surat penyerahan tanggal 10 Oktober 1976 itu tapi secara perlahan-lahan hanya untuk dirinya sendiri akan tetapi terdakwa ke 2 itu tidak ikut menanda tangani dalam zegel surat penyerahan itu.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah didengar pula keterangan-keterangan saksi di bawah sumpah yang antara lain menerangkan sebagai berikut :

I. Saksi Ami Sahroni bin Ahmad.

1. bahwa saksi mengakui anaknya dari Ahmad bin Amsar dan telah mewakili bapaknya dalam musyawarah tanggal 10 Oktober 1976 antara Awinta dengan pihak bapak saksi (Ahmad).

2. bahwa saksi telah membenarkan bahwa pada musyawarah tanggal 10 Oktober 1976 tidak ada penyelesaian.

3. bahwa saksi menerangkan bahwa Awinta menyerahkan sawah dan tanah darat itu setelah musyawarah selesai yaitu pada jam 09.00 atau jam 21.00 tanggal 10 Oktober 1976 di rumahnya Awinta akan tetapi saksi sendiri tidak mengetahui terjadinya penyerahan sawah dan

tanah darat tersebut oleh Awinta.

4. bahwa mengenai zegel surat penyerahan tanggal 10 Oktober 1976 itu dibuat oleh Lurah Desa Pasir Waru Encap Samsyudin di rumah lurah tersebut.

5. bahwa saksi menerangkan bahwa para terdakwa telah mengambil tengahan padi dari blok Ciambar sebanyak 210 kg dari penggarapnya Oyo dimana Oyo tersebut disuruh menggarap sawah tersebut atas perintah bapak saksi yang bernama Ahmad.

6. bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa-terdakwa secara bersama-sama telah menyerobot penggarap tanah darat di blok Muntur dan Kp. Serut dan merusak atau menebang pohon-pohon yang ada di atas tanah darat tersebut.

II. Saksi Achmad Sadili bin Uso.

1. bahwa saksi menerangkan pernah mengadakan musyawarah yang diadakan di balai desa Pasir Waru pada tanggal 10 Oktober 1976 antara Awinta dan Ahmud yang diwakili oleh Ami Sahroni akan tetapi tidak ada penyelesaian.

2. bahwa keesokan harinya saksi bersama-sama dengan Dili pernah menyaksikan penanda-tanganan zegel surat penyerahan itu oleh Awinta dan Ayub di rumahnya Awinta kira-kira jam 11.00.

3. bahwa sebelum zegel surat penyerahan ditanda-tangani oleh Awinta dan terdakwa Ayub tidak dibacakan terlebih dahulu, hanya kelihatan yang membaca itu terdakwa Ihin.

4. Saksi mendengar dari Ami Sahroni bahwa penyerahan sawah dan tanah darat tersebut pada jam 09.00 malam atau jam 21.00 tanggal 10 Oktober 1976.

5. Saksi ikut menanda-tangani dalam surat penyerahan itu.

III. Saksi Yoyo bin Sanusi.

1. bahwa saksi pernah menggarap sawah yang terletak di blok Ciambar pada akhir tahun 1976 atas perintah Ahmud.

2. bahwa saksi pernah menanyakan kepada Ahmud bahwa sawah ini dari Awinta.

3. bahwa pada waktu memotong padi dari sawah tersebut saksi memberitahukan kepada Ami Sahroni sebagai wakil dari Ahmud.

4. bahwa sewaktu padi sudah beres dipotong dan akan dibagi dua dengan Ami Sahroni datang terdakwa-terdakwa akan mengambil hasil paroannya dan oleh saksi paroannya itu diserahkan kepada terdakwa-terdakwa.

5. bahwa sebelum saksi menyerahkan hasil paroan padi tersebut

kepada terdakwa-terdakwa pernah menanyakan terlebih dahulu apa sebabnya paron padi ini diambil oleh terdakwa-terdakwa dan terdakwa-terdakwa menjawab disuruh oleh bapaknya (Awinta) supaya diambil dari saksi.

IV. Saksi Encup Syamsudin bin Enjeh.

1. Bahwa saksi pernah menghadiri musyawarah yang diadakan di balai desa Pasir Waru pada tanggal 10 Oktober 1976 antara Awinta dan Ahmud yang diambil oleh Ami Sahroni.

2. bahwa musyawarah itu tidak ada penyelesaian dan saksi selaku Kepala Desa telah menyarankan kepada kedua belah pihak agar hal ini diselesaikan secara kekeluargaan.

3. bahwa saksi pernah mengetik surat penyerahan tersebut yang konsepnya kata Ami Sahroni dapat sdr. Holil.

4. bahwa saksi pernah ikut menanda-tangani dalam surat penyerahan itu setelah ditanda-tangani oleh Awinta, dijempol oleh Ahmud dan saksi-saksinya.

V. Saksi Dili bin Hadis.

1. bahwa saksi pernah menghadiri musyawarah yang diadakan di balai desa Pasir Waru pada tanggal 10 Oktober 1976 antara Awinta dengan Ahmud yang diwakili oleh Ami Sahroni.

2. bahwa musyawarah itu tidak ada penyelesaian.

3. bahwa keesokan harinya kira-kira jam 09.00 saksi telah disuruh oleh Ahmud untuk membawa zegel surat penyerahan itu kepada Awinta untuk ditanda-tangani.

4. bahwa saksi menyaksikan sewaktu Awinta menanda-tangani zegel surat penyerahan tersebut di rumahnya Awinta dan juga saksi melihat terdakwa Ayub ikut menanda-tangani dalam zegel surat penyerahan itu.

5. bahwa surat penyerahan itu tidak dibacakan dahulu hanya dibaca oleh terdakwa Ihin saja.

6. saksi ikut menanda-tangani dalam surat penyerahan itu.

VI. Saksi Ajengan Ahmad bin Ijromi.

1. bahwa saksi pernah menghadiri musyawarah yang diadakan di balai desa Pasir Waru pada tanggal 10 Oktober 1976 antara Awinta dan Ahmud yang diwakili oleh Ami Sahroni.

2. bahwa musyawarah itu tidak ada penyelesaiannya.

3. saksi ikut menanda-tangani dalam surat penyerahan itu setelah ditanda-tangani oleh yang bersangkutan (Awinta dan Ahmud) saksi-saksinya, serta Lurah Desa Pasir Waru; saksi tidak mengecek terlebih

dahulu akan kebenaran surat penyerahan itu, hanya saksi percaya saja kepada si penanda tangan yang terlebih dahulu.

VII. Saksi Acin Hilman bin Bahri.

1. bahwa saksi pernah menghadiri musyawarah yang diadakan di balai desa Pasir Waru pada tanggal 10 Oktober 1976 antara Awinta dan Ahmud yang diwakili oleh Ami Sahromi.

2. bahwa musyawarah itu tidak ada penyelesaiannya dan pada waktu itu Awinta minta tempo untuk pikir selama 1 minggu.

3. Saksi mendengar dari Tua Kampung Dili bahwa Awinta telah menyerahkan sawah dan tanah darat tersebut pada keesokan harinya setelah musyawarah tersebut dan saksi beserta Ami Sahromi mendapat panggilan dari Lurah Desa Pasir Waru agar pada hari itu pergi ke rumah lurah tersebut.

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah seseorang terdakwa telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana, maka haruslah terbukti unsur-unsur dari tindak pidana itu ;

Menimbang, bahwa terdakwa-terdakwa telah dituduh melakukan kejahatan sebagaimana tercantum dalam tuduhan ke I yaitu "Pencurian" sebagaimana tercantum dalam pasal 55 yo pasal 362 K.U.H.P. dan tuduhan ke 2 yaitu "Memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya" sebagaimana tercantum dalam pasal 2 yo pasal 6 ayat 1 sub a dan b Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 51/1960.

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa-terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana diterangkan dalam tuduhan ke I adalah berhubungan erat dengan apa yang dituduhkan dalam tuduhan ke II, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri membahas terlebih dahulu tuduhan ke II yaitu sebagaimana tercantum dalam pasal 2 yo pasal 6 ayat 1 sub a dan b Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 51/1960.

Bahwa unsur dari tindak pidana itu sebagai berikut :

"Dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya".

Menimbang bahwa sehubungan dengan unsur pasal tersebut di atas baiklah diperhatikan dan dihubungkan dengan terdakwa-terdakwa maupun dengan keterangan saksinya di muka persidangan atau dengan saksi yang lainnya sehingga akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan pendapat :

Menimbang bahwa sawah dan tanah darat yang diserahkan atau dikuasai dan digarap oleh terdakwa-terdakwa itu bagi Pengadilan Negeri

masih merupakan tanda tanya apakah benar-benar sudah merupakan hak milik mutlak dari Ahmud sebagai penyerahan dari Awinta atau bukan ?

Menimbang, bahwa Jaksa sebagai penuntut umum dalam perkara ini telah mengajukan suatu bukti tertulis yaitu photo copy Penyerahan, Pasir Waru 10 Oktober 1976 antara Awinta bin Ahmid dan Ahmud bin Amsar.

Menimbang bahwa sebagaimana tercantum dalam Surat Penyerahan itu ada kalimat berbunyi antara lain :

Saya pihak ke satu pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 1976 jam 15.00 di hadapan Pemerintah Desa Pasir Waru memasrahkan tirkahnya Ahmid bin Amsar atau yang tidak masuk dalam surat hibah dari Ahmid kepada saya (Awinta) di antaranya :

1. Tanah sawah luasnya 100 da yang terletak di Ciambar.
2. Tanah sawah (pekarangan) luasnya 55 da. yang terletak di kampung Serut.
3. Tanah darat luasnya 3 ha. yang terletak di blok Muntur, desa Sukadana.

Tanah tersebut diserahkan kepada pihak kedua (Ahmud) sebagai satu-satunya akhliwaris (adiknya yang masih hidup);

Menimbang bahwa akan tetapi isi dari surat penyerahan tersebut dengan kalimat tersebut di atas telah disangkal kebenarannya oleh terdakwa-terdakwa dan bertentangan pula dengan keterangan dari saksi-saksi yang mengikuti musyawarah tanggal 10 Oktober 1976 itu sendiri, dimana menurut keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa pada musyawarah tanggal 10 Oktober 1976 antara Awinta dengan Ahmud itu tidak ada penyelesaian.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya hal tersebut di atas timbul tanda tanya dari mana dasarnya akan kebenaran isi surat penyerahan itu ?

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata baik menurut keterangan terdakwa-terdakwa maupun keterangan saksi-saksi sebagaimana terurai di atas bahwa pada musyawarah tanggal 10 Oktober 1976 itu tidak ada penyelesaian, tegasnya Awinta tidak menyerahkan sawah dan tanah darat tersebut kepada Ahmud, sehingga dengan demikian isi surat penyerahan tanggal 10 Oktober 1976 bertentangan dan atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, tegasnya pada musyawarah tanggal 10 Oktober 1976.

Menimbang, bahwa saksi Ami Sahromi bin Ahmud di muka per-

sidangan menerangkan bahwa penyerahan itu dilakukan pada jam 09.00 malam atau jam 21.00 tanggal 10 Oktober 1976 di rumahnya Awinta sendiri, akan tetapi hal ini tidak ada seorang saksipun yang menerangkan dan atau mengetahui akan serah terima sawah dan tanah darat tersebut dari Awinta kepada siapa Awinta menyerahkan sawah dan tanah darat tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal-pasal 163, 164, 165 dan 171 H.I.R. sekalipun pasal-pasal tersebut berlaku untuk acara perdata, dapat juga digunakan dalam acara pidana, sepanjang mengenai bukti-bukti tersebut tidak disangkal oleh terdakwa ;

Menimbang bahwa sehubungan dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh Jaksa penuntut umum dalam perkara ini disangkal oleh terdakwa-terdakwa, maka hal ini harus dibuktikan lebih lanjut mengenai siapa yang sebenarnya berhak atas sawah dan tanah darat tersebut, sedangkan pros. acara pidana tidak demikian halnya ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Bandung dalam putusannya tertanggal 13-8-1973 No. 15/1972 Pid. PTB. berpendapat : sengketa hak atas sesuatu barang, merupakan sengketa mengenai suatu hak perdata, yang harus diperiksa dan diadili oleh Hakim Perdata dan bukan oleh Hakim Pidana.

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut :

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pengadilan Negeri di Garut yang memeriksa perkara pidana dalam perkara ini, menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa perkara terdakwa-terdakwa dalam perkara ini, karena perkara terdakwa-terdakwa dalam perkara ini adalah hak milik, tegasnya persengketaan hak perdata.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Negeri menganggap tidak perlu untuk membahas tuduhan ke I.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) photo copy surat penyerahan tertanggal 10 Oktober 1976 tetap terlampir dalam berkas perkara ini, kecuali apabila bukti tersebut akan digunakan oleh yang berhak untuk perkara lain.

Menimbang, bahwa ongkos perkara seluruhnya ditanggung oleh Negara.

MENGADILI

Menyatakan, oleh karena perkara terdakwa-terdakwa dalam per-

kara ini ialah soal persengketaan hak milik, maka Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara pidana tidak berwenang untuk memeriksa perkara ini.

Menetapkan, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) photo copy surat penyerahan tertanggal 10 Oktober 1976 tetap terlampir dalam berkas perkara ini kecuali apabila bukti tersebut akan digunakan oleh yang berhak untuk perkara lain.

Menetapkan, bahwa ongkos perkara seluruhnya ditanggung oleh Negara.

Demikianlah diputuskan pada hari ini, Selasa tanggal 7 Pebruari 1978 oleh kami Djadja A. Djaelani SH, Hakim Ketua, Djafar D. Suriawinata SH dan Atjo Darsono, masing-masing sebagai Hakim Anggota Pengadilan Negeri Garut, berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut tanggal 7 Desember 1977 No. 290/S.P./1977 Pid. P.N. Grt. keputusan mana diucapkan di muka umum dalam persidangan terbuka yang diadakan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dan di hadapan: Ending Sugandi, Jaksa, Komarudin Ch.M., Panitera Pegganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadliri oleh terdakwa-terdakwa dan pembela.